

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Jakarta, Rajawali Press, 1999.
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Andi Muhammad Asrun, dkk, *Analisis Yuridis dan Empiris Peradilan · Niaga*, Pusat Informasi dan Pengkajian Hukum -Ekonomi, Jakarta, 2000.
- Andrew Hicks & SH Goo, *Company Law, caes &Material*, JDE, 1994.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Erman Radjaguguk, “*Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*”, Makalah, Jakarta, 2007.
- Gunawan Widjaja, “*Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*”, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Ctk.Pertama, PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2002.
- Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Ctk.Pertama, Edisi Pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Ctk.Pertama, Kencana, Jakarta, 2008.
- Hendra Setiawan Boen, “*Bianglala Business Judgement Rule*”, PT Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Iman Soepomo, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1996.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ctk Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 1999.

- Mariam Darus Badruzaman, *Kompendium Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ctk.Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*, Ctk.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional, dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Pitlo, *Hukum Perdata: Perbuatan Melawan Hukum, diterjemahkan oleh Soebekti*, Jakarta, Intermasa, 1992.
- Prasetio, *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2014.
- Pelu, Ibnu Elmi As; Helim, Abdul. *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*. Setara Press, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2003.
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian*, Ctk.Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata "dalam Teori dan Praktek"*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2004.
- Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Setara Press, Malang, 2018.

- Serlika Aprita, Rijalush Shalihin, “*Hukum Kepailitan Dalam Islam*”, Penerbit Mitra Wacana Media, Bogor, 2023.
- Siti Anisah, *Perlindungan kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Stefanus Mahendra S.I., *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cet. Ke-4, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung, 2019.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, Ctk.Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Kepailitan: Suatu Komentar atas UU No. 37 Tahun 2004*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta, Alumni, 1995.

Jurnal

- Azwar, Syahrul. “*Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*”. 2018. PhD Thesis. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

- Bankruptcy, O. F. “Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan”. *Jurnal Yudisial*, 2017, Vol.10, No.3.
- Devi Andani Dan Wiwin Budi Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3 , 2021.
- Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *JH Ius Quia Iustum*, Edisi No. 3 Vol. 23, 2021.
- Dewanto, Pandu. Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 2020, Vol. 5. No.2.
- Dias, Rafael Angelo, Et Al. Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu (Studi Kasus: Putusan Nomor: 04/Pdt. Sus. Pailit/2015/Pn. Niaga. Jkt. Pst)”. *Jurnal Hukum Adigama*, 2018, Vol.1, No.2.
- Dimas Gherry Ade Duandana, Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Studi Kasus Di Pengadilan Niaga Semarang, “*Naskah Publikasi*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Emilda Kuspraningrum, *Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 1 Tahun 1995 Dan Perbandingannya Dengan KUHD*, Risalah Hukum, 2005, No.1.
- Enju Juanda, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Galuh Justisi*, Edisi No.1 Vol. 2, 2016.
- Harahap, Putri Sari, Tumanggor. “Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas”. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 2015, Vol. 1.No. 1.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. “Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan”. *Jurnal Panorama Hukum*, 2017, Vol.2, No.1.
- Kadir, Yunita. “Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”. *Calyptra*, 2014, Vol.3, No.1.
- Martha Vivvy E.P dkk, “Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian Atau Kesalahannya Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit”, *Jurnal hukum Ekonomi*, Edisi No.1, Vol. I, 2013.
- Michael Brayn Rompas, “Kekuasaan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol.I, No.3, 2013.
- Nelson Kapoyos, “Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan: Kajian Putusan Nomor 125 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015”, *Jurnal Yudisial*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Vol. 10, No. 3, 2017.

- Nur Sa'adah, "Akibat Hukum Pemuktian Perjanjian Tidak Tertuli", *Pamulang Law Review*, Edisi No. 1, Vol. 2, 2018.
- Nurhafifah, Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Vol. 1.No. 2.
- Putriyanti, Erma Defiana; Wijayanta, Tata. "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2010, Vol.22, No.3.
- Ramadhani, Rahmatullaili, Maresti, Dwila. "Pengaruh Leverage Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Csr. Ekonomis", *Journal Of Economics And Business*, 2021, Vol. 5, No. 1.
- Ricardo Simanjuntak, "Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 23, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2004
- Rochmawanto, Munif. "Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan". *Jurnal Independent*, 2015, Vol. 3.No. 2.
- Saenah, Siti. "Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata". *Journal Jurista*, 2017, Vol.6, No.1.
- Sartika Nanda Lestari, "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia", *Jurnal Notarius Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Edisi 08, No. 2, 2015.
- Sinaga, Niru Anita; Sulisrudatin, Nunuk. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2018, Vol.7, No.1.
- Siti Hapsah Isfardiyana, "Business Judgement Rule oleh Direksi Perseroan", *Jurnal Panorama Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 2, 2017.
- Sunarmi, "Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No. 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)", *USU Law Journal*, 2016, Vol. 4 No. 4.
- Syita, Kunti Kalma. "Penerapan Prinsip Pembuktian Hukum Perdata Formil Dalam Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999". *Yuridika*, 2014, Vol.29, No.1.
- Tirayo, Adriel Michael; Halim, Yoefanca. "Problematis Definisi Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Kepailitan Dan PKPU". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2019, Vol.6, No.2.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014, Vol.14, No.2.

Wijayanta, “Tata. Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2014, Vol.26, No.1.

Yoshe Agatha, “Sistem Pembuktuan Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan”, *Jurist Diction*, Edisi No.6, Vol.5, 2022.

Yunita Kadir, “Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2014, Vol.3, No.1.

Thesis

Victoranius Puang, M.H, “Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit”, *Master Theses (Notary)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006.

Azwar, Syahrul. *Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*. Thesis. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Staatsblaad tahun 1905 No. 217 *juncto* Staatsblaad Tahun 1906 No. 348.

Data Elektronik

Law Firm Andreas Bagus & Patners Advocates, Batasan Tanggung Jawab Direksi Jika Perusahaan Pailit, terdapat pada <https://abpadvocates.co/batasan-tanggung-jawab-direksi-jika-perusahaan-pailit/>, diakses pada 29 Januari 2024.